

**DEMOKRATISASI DI IRAQ DAN *SELF-
DETERMINATION* SUKU KURDI
PASCA JATUHNYA REZIM SADDAM HUSSEIN
(2003-2004)**

SKRIPSI

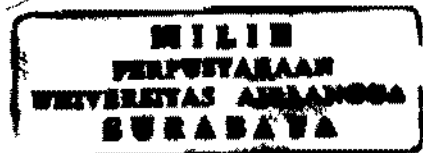
Fis HI 25/05
Nov
d



Ditusun Oleh :

HARIATNI NOVITASARI

079916008



**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA**

2005

**DEMOKRATISASI DI IRAQ DAN *SELF-
DETERMINATION* SUKU KURDI
PASCA JATUHNYA REZIM SADDAM HUSSEIN
(2003-2004)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Melengkapi Tugas-Tugas dan
Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

Diusun Oleh :

HARIATNI NOVITASARI

079916008



**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA**

2005

HALAMAN PERSETUJUAN

Setuju Untuk Diujikan

Surabaya, 1 Desember 2004

Dosen Pembimbing



Dra. Lili Salarnah, Msi
NIP. 131 569 360

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**DEMOKRATISASI DI IRAQ DAN SELF-DETERMINATION
SUKU KURDI PASCA JATUHNYA REZIM SADDAM HUSSEIN**

(2003-2004)

Telah Dipertahankan Di Depan Komisi Penguji
Pada Hari Senin, 10 Januari 2005
Pukul 11.00 WIB

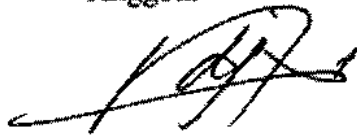
Komisi Penguji

Ketua



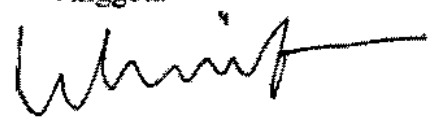
Dra. Suhartatie Hidayat, MA
NIP. 130 531 812

Anggota



Drs. Ajar Triharso, MS
130 289 504

Anggota



I Gde Wahyu W, SIP, MA

ABSTRAK

Invasi Amerika Serikat ke Iraq berhasil menggulingkan rezim Saddam Hussein yang telah memerintah sejak tahun 1979. Setelah perang usai, dilakukan rekonstruksi (*re-building*) pasca perang untuk memperbaiki infrastruktur dan suprastruktur yang telah rusak. Rekonstruksi ditekankan pada dua bidang, yaitu ekonomi dan politik. Asumsinya, rekonstruksi kedua bidang ini bisa membawa perubahan positif di bidang lainnya. Demokratisasi merupakan agenda utama di bidang politik. Sedangkan di bidang ekonomi dikembangkan privatisasi, terutama di bidang perminyakan.

Demokratisasi merupakan proses untuk menjadikan Iraq negara yang lebih demokratis pasca Saddam Hussein. Selama memerintah, Saddam Hussein dianggap menjalankan pemerintahan yang otoriter. Demokratisasi memberikan kebebasan dan persamaan hak kepada warga untuk menuntut hak politiknya. Tidak terkecuali Suku Kurdi. Sejak Iraq merdeka, hubungan antara Suku Kurdi dengan rezim yang berkuasa merupakan hubungan yang konflikual. Sumber konflik adalah perebutan teritorial dan dipicu oleh perbedaan etnis. Pasca Saddam, mereka menuntut untuk mendirikan negara sendiri yang independen.

Melalui penelitian yang bersifat deskriptif-eksplanatif ini, penelitian ini menggunakan unit analisis demokratisasi di Iraq pasca rezim Saddam Hussein, sedangkan unit eksplanasinya adalah *self-determination* Suku Kurdi. Karena itu, peringkat analisis yang digunakan adalah negara-bangsa. Dalam peringkat analisis ditambahkan pendekatan sejarah sebagai alat untuk melihat kondisi demokrasi di Iraq sebelum jatuhnya rezim Saddam Hussein. Sebagai pisau analisis digunakan konsep demokrasi, konsep legitimasi, teori konflik dan teori integrasi.

Dari kerangka teoritik yang digunakan dan didukung dengan fakta-fakta yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa demokratisasi di Iraq masih berada dalam fase transisi. Demokratisasi di Iraq tidaklah mudah karena adanya beberapa hambatan, seperti instabilitas keamanan, ide demokrasi bukan berasal dari rakyat Iraq, tidak adanya identitas nasional yang kohesif dan kurangnya tradisi demokrasi sejak jatuhnya pemerintahan monarkhi. Di dalam negara yang masyarakatnya terpecah (*divided society*), demokratisasi menjadi tantangan bagi integrasi. Suku Kurdi yang selama pemerintahan rezim otoriter terpinggirkan, menjadikan demokratisasi sebagai peluang untuk menuntut hak politik, termasuk kemerdekaan.

Kata Kunci: Iraq, demokratisasi, *self-determination*, Suku Kurdi.